

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan tentang Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pelatihan Atlet Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi di Jawa Tengah terdapat beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut antara lain :

1. minimnya anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi di Jawa tengah yang berakibat kurangnya sarana prasarana penunjang yang berujung pada kurang maksimalnya prestasi atlet Jawa Tengah.
2. Minimnya fasilitas keolahragaan yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga menghambat perkembangan atlet di Jawa Tengah berakibat pada kurang optimalnya prestasi atlet.
3. Minimnya Peran pihak swasta dalam rangka kepedulian untuk pengembangan olahraga prestasi di Jawa Tengah.

Dalam menghadapi kendala tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Menentukan cabang olahraga unggulan daerah dan melakukan koordinasi dengan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota agar terciptanya sinergisitas penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga

atlet Provinsi Jawa Tengah dapat berprestasi di tingkat Nasional atau bahkan Internasional.

Pada tahun anggaran 2016 terdapat beberapa kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pelatihan atlet daerah Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 3.650.000.000,- , Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 6.270.570.000,- , Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dengan anggaran sebesar Rp. 10.451.430.000,- , Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 355.000.000,- , dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani dengan anggaran sebesar Rp. 693.000.000,-.

Diantara pengalokasian anggaran tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- 1 Minimnya Anggaran membuat sehingga banyak kegiatan-kegiatan keolahragaan tidak dapat / belum terkordinir.
- 2 Masih kurangnya pemahaman administrasi keuangan oleh civitas kantor DISPORAPAR Jawa Tengah yang berakibat pada keterlambatan pelaporan dengan waktu yang terbatas.
- 3 Sistem Aplikasi yang masih mengalami *crash* atau gangguan dan *rigid* atau kaku karena masih sering terjadinya keterlambatan dalam pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga terjadinya keterlamabatan dalam upload data.

- 4 Kurangnya pemahaman pentunjuk teknis tentang penatausahaan keuangan yang mengakibatkan pelaporan terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi tidak tepat waktu.

4.2 Saran

Saran dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat berkenaan dengan pembinaan olahraga di Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Hendaklah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penambahan anggaran untuk mengakomodir segala kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar seluruh kegiatan dapat terakomodir dan terlaksana dengan baik.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hendaknya membangun dan memberikan fasilitas keolahragaan yang baik agar atlet Provinsi Jawa Tengah dapat berkembang dan berprestasi.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hendaknya mengelola manajemen keolahragaan dengan baik dan dengan kemasan yang menarik dengan cara menggandeng semua elemen masyarakat termasuk pihak swasta.

Saran dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat bagi pengalokasian anggaran pembinaan dan pelatihan atlet daerah Provinsi Jawa Tengah tahun berikutnya adalah

1. Hendaklah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penambahan anggaran untuk mengakomodir segala kegiatan-

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar seluruh kegiatan dapat terakomodir dan terlaksana dengan baik.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hendaknya memahami dalam pengadministrasian keuangan serta pemahaman tentang sistem aplikasi yang saat ini ada dengan cara melakukan pelatihan/diklat/Bintek agar tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan data terkait penggunaan anggaran pembinaan dan pelatihan atlet.
3. Pada pihak staff Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah seharusnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan data secara tepat waktu kepada bagian keuangan, sehingga bagian keuangan tidak mengalami kesulitan dan keterlambatan data dalam pengajuan Tambahan Uang (TU).